

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra¹
Dodik Ariyanto²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Badung yang mencakup kepala bidang, sekretaris, dan staf bagian keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the quality of human resources, communications, organizational commitment, and leadership style to the readiness of the application of the accrual-based government accounting standards. The analytical tool used is multiple linear regression. The sample was all SKPDs Badung which includes department heads, secretaries, and the finance department staff. These results indicate that the variable quality of human resources, communications, organizational commitment, and leadership style has positive influence on the readiness of the application of the accrual-based government accounting standards.

Keywords: Accrual Based Accounting Standards Administration.

PENDAHULUAN

Perubahan pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketaatan dapat semakin diwujudkan. Salah satu perwujudan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 adalah menetapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas. Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Perubahan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan Negara.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan hal ini

ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Beberapa Negara yang menerapkan standar akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala yang dihadapi pada tahap awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual (Christensen, 2002). Di Negara Malaysia, terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif ini meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk kursus yang mengarah pada keahlian akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006). Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor, pemerintah, dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 2010). Namun, pada pulau Fiji ada ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan membengkaknya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). Persiapan penerapan akuntansi akrual di Hong Kong telah dimulai sejak tahun 2003 dan 2004. Dengan diberlakukannya sistem yang baru ini, masalah yang dihadapi kemudian adalah sistem akuntansi akrual akan memberikan dampak

yang sangat besar terhadap sistem, pelaksana, dan budaya yang telah berjalan sejak lama. Penerapan sistem yang baru tersebut tentunya akan membutuhkan biaya yang secara signifikan cukup besar, baik untuk menyiapkan hardware maupun software yang akan digunakan. Untuk pelaksana, tentunya akan tidak mudah dan cepat dalam menyiapkan para akuntan pemerintah agar dapat memahami sistem akrual dengan baik. Sedangkan dampak terhadap budaya, tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap budaya di hampir seluruh departemen pemerintah karena selama ini departemen-departemen tersebut bekerja layaknya pusat biaya. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang paling sukses dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publiknya. Tingkat perubahan (the degree of change) dalam manajemen sektor publik di Selandia Baru dilalui dengan cepat dan sangat inovatif. Pemerintah mereformasi hampir di semua lini pemerintahan, mulai dari pelaksana (para pejabat pengelola keuangan dan akuntan negara), sistem yang digunakan, hingga ke budaya yang dianut di setiap lembaga negara, yang dituangkan dalam *Public Finance Act* 1989 (Ghulam, 2013).

Beberapa akademisi dan peneliti telah melakukan penelitian mengenai kesiapan pemerintah terhadap penerapan PP No 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Ardiansyah (2011) dan Rahmayati (2012) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pelaporan pemerintahan studi kasus pada KPPN Malang. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa penelitian tersebut berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel kualitas sumber daya

manusia dan hubungan komunikasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual. Namun tidak berhasil menemukan bukti adanya pengaruh variabel komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pelaporan berbasis akrual.

Herlina (2013) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 studi empiris kabupaten Nias Selatan. Kesimpulan yang didapat di dalam penelitian ini adalah bahwa dari keseluruhan item yang dianalisis dihasilkan tiga faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual yaitu informasi, prilaku, dan ketrampilan. Dari tiga faktor yang mempengaruhi tersebut merupakan ekstraksi dari enam belas item pernyataan yang merupakan bagian dari lima variabel yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual yaitu komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, struktur birokrasi, komitmen pemimpin, dan resistensi terhadap perubahan.

Kristiyono (2013) meneliti mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan keuangan daerah sesuai PP No 71 Tahun 2010 studi pada dinas pendidikan kota Semarang tahun 2012/2013. Davis (2010) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, sumber daya manusia (SDM), komitmen, dan perangkat pendukung.

Khairina (2011) meneliti mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dan diterimanya gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi kerja, maka makin meningkat pula efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja (Rowles, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa semakin memadai kualitas SDM atau personel yang terkait dengan penganggaran, maka makin meningkat pula efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja (Stefanescu, 2011).

Pernyataan pro-kontra mengenai kesiapan pemerintah daerah mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terus timbul (Adriana, 2008). Hal menonjol yang terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kristyono, 2013). Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (Aldiani, 2010). Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai

akuntansi pemerintahan. Selain itu, menurut Simanjuntak (2010), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan (Abdurahman dkk, 2012). Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan (Grandis, 2012).

Selain itu diperlukan komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur standar yang berbeda cukup jauh dari standar yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baru ini dapat terlaksana dengan baik. Dalam setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi. Blondal (2003) sebagaimana dikutip oleh Boothe (2007) dalam Halim (2012), mengatakan bahwa kesulitan penerapan anggaran berbasis akrual di pemerintahan adalah terkait Anggaran akrual diyakini beresiko dalam disiplin

anggaran. Keputusan politis untuk membelanjakan uang sebaiknya ditandingkan dengan ketika belanja tersebut dilaporkan dalam anggaran. Hanya saja, basis kas yang dapat menyediakannya. Jika sebagian besar proyek belanja modal, misalnya, dicatat dan dilaporkan pada beban penyusutan, akan berakibat meningkatkan pengeluaran untuk proyek tersebut (Blondal, 2003) sebagaimana dikutip oleh Boothe (2007) dalam Halim (2012),

Selanjutnya, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri (Robbins, 2009:310). Simanjuntak (2010) dan (Yogantara, 2012) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Ritonga (2010) dalam Halim (2012) menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama. Menurut Simanjuntak (2010), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Berdasarkan atas latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?
- 2) Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?
- 3) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?
- 4) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang mencakup seluruh unit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada bagian pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) yang terdiri dari kepala bidang, sekretaris, dan staf pegawai bagian keuangan di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan jumlah 51 unit SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Obyek penelitian adalah suatu nilai kegiatan yang ditetapkan peneliti dan kemudian diteliti untuk dipelajari sehingga

mendapatkan kesimpulan (Sugiyono, 2010:38). Obyek dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah atas penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan.

Sampel penelitian ini mencakup pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD yaitu pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD) yang terdiri dari satu kepala bidang, satu sekretaris, serta satu orang staf bagian keuangan di masing-masing SKPD. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* (sederhana). Dikatakan sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut (Sugiyono, 2013:118). Adapun pertimbangan yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah : Merupakan staf yang bertanggung jawab langsung atau memiliki garis komando langsung terhadap kepala SKPD sebagai penanggung jawab utama (berdasarkan struktur organisasi), yaitu seluruh sekretaris dan kepala bidang dari seluruh SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Setiap SKPD diambil sampel 1 orang Kepala Bidang, 1 orang Sekretaris, dan 1 orang Staff. Responden pernah ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD minimal satu kali.

Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan metode survey/teknik kuesioner. Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden mengenai kualitas sumber daya manusia,

komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 153 responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini diperoleh karakteristik responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, jabatan, dan lama menjabat SKPD Kabupaten Badung. Daftar tabel untuk masing-masing karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (persen)
Jenis kelamin		
Laki-laki	91	59,48
Perempuan	62	40,52
Jumlah	153	100
Jabatan		
Kepala Bidang	29	18,96
Sekretaris	51	33,33
Staf	51	33,33
Camat	6	3,92
Lurah	16	10,46
Jumlah	153	100
Lama Menjabat		
≤ 1 tahun	0	0
>1-2 tahun	61	39,87
>2-3 tahun	54	35,29
> 3 tahun	38	24,84
Jumlah	153	100

Sumber : Data Diolah 2014

Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total item. Nilai korelasi antar skor item dengan total item kemudian dibandingkan dengan r kritis. Jika korelasi item

terhadap skor total lebih besar dari r kritis (0,30) maka instrumen dikatakan valid.

Hasil uji validitas instrumen penelitian akan disajikan pada Tabel 2.

Tabel2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	T hitung	T tabel	Keterangan
Kualitas SDM	X _{1,1}	0,923	0,361	Valid
	X _{1,2}	0,923	0,361	Valid
	X _{1,3}	0,855	0,361	Valid
	X _{1,4}	0,770	0,361	Valid
Komunikasi	X _{2,1}	0,908	0,361	Valid
	X _{2,2}	0,904	0,361	Valid
	X _{2,3}	0,908	0,361	Valid
	X _{2,4}	0,700	0,361	Valid
	X _{2,5}	0,731	0,361	Valid
	X _{2,6}	0,904	0,361	Valid
	X _{2,7}	0,846	0,361	Valid
Komitmen Organisasi	X _{3,1}	0,738	0,361	Valid
	X _{3,2}	0,811	0,361	Valid
	X _{3,3}	0,920	0,361	Valid
	X _{3,4}	0,712	0,361	Valid
Gaya Kepemimpinan	X _{4,1}	0,766	0,361	Valid
	X _{4,2}	0,707	0,361	Valid
	X _{4,3}	0,843	0,361	Valid
	X _{4,4}	0,764	0,361	Valid
	X _{4,5}	0,760	0,361	Valid
	X _{4,5}	0,788	0,361	Valid
Penerapan SAP Berbasis Akrua	Y ₁	0,997	0,361	Valid
	Y ₂	0,997	0,361	Valid
	Y ₃	0,977	0,361	Valid
	Y ₄	0,889	0,361	Valid
	Y ₅	0,947	0,361	Valid

Sumber : Data Diolah 2014.

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila berada di atas angka 0,60. Hasil pengujian reliabilitas instrumen dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Y)	0,987
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,942
Komunikasi (X ₂)	0,932
Komitmen Organisasi (X ₃)	0,892
Gaya Kepemimpinan (X ₄)	0,909

Sumber : Data Diolah 2014.

Hasil uji normalitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,222 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi ini berdistribusi normal. Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas dan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (X ₁)	0,709	1,411
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₂)	0,777	1,287
Komitmen Organisasi (X ₃)	0,694	1,441
Gaya Kepemimpinan (X ₄)	0,829	1,206

Sumber: Data Diolah, 2014

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,963	Bebas heteroskedastisitas.
Komunikasi (X ₂)	0,929	Bebas heteroskedastisitas.
Komitmen Organisasi (X ₃)	0,735	Bebas heteroskedastisitas.
Gaya Kepemimpinan (X ₄)	0,934	Bebas heteroskedastisitas

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai sig. masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel tersebut bebas heteroskedastisitas. Analisisregresi linear berganda diolah dengan bantuan *software* SPSS *for* Windows versi 15.0 dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,180	0,255		0,707	0,481
Kualitas Sumber Daya Manusia (X ₁)	0,272	0,010	0,548	28,240	0,000
Komunikasi (X ₂)	0,053	0,008	0,118	6,361	0,000
Komitmen Organisasi (X ₃)	0,347	0,013	0,504	25,719	0,000
Gaya Kepemimpinan (X ₄)	0,020	0,008	0,043	2,410	0,017
<i>AdjustedR</i> ²					0,959
F Hitung					900,974
Sig. F					0,000

Sumber : Data Diolah 2014.

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi t untuk variabel Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa H₁ diterima, yang berarti bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia dalam pemahaman standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2011), Wiley dalam Arfianti (2011), dan Kristiyono (2013)

menemukan bukti adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Dalam penelitian ini, pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi t untuk variabel Komunikasi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin baik komunikasi yang dilakukan SKPD dalam mensosialisasikan dan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2011), Barnard dalam Luthan (2006:370), dan Herlina (2013) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tabel 6 menunjukkan tingkat signifikansi t untuk variabel Komitmen Organisasi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah (2011) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat (Thoha dalam Khairina, 2011). Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya kepemimpinan yang tinggi orientasi tugas dan tinggi orientasi hubungan manusia (Carver dan Sergiovani dalam Khairina, 2011). Dalam penelitian ini, pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat signifikansi t untuk variabel Gaya Kepemimpinan sebesar $0,017 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, yang berarti bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan dalam SKPD, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung.

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa model *summary* besarnya *Adjusted R²* untuk variabel terikat (penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual) adalah sebesar 0,959. Ini berarti kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat dijelaskan oleh kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan sebesar 95,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,1 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa keempat variabel independen mampu memprediksi atau menjelaskan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang diperoleh maka peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan pengembangan dalam penelitian ini dengan meneliti di kabupaten yang berbeda untuk dijadikan bahan perbandingan dan menambah variabel yang mendukung pemerintahan dalam mempersiapkan kebijakan yang baru. Bagi SKPD Kabupaten Badung disarankan agar dapat memberikan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan yang intensif bagi seluruh SKPD yang ada untuk mematangkan kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diberlakukan penuh pada tahun 2015.

REFERENSI

- Abdurahman Rigel Hullah, dkk. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSRAT*, 3(2)
- Adriana. 2008. Cash Versus Accrual Accounting In Public. *Journal University Babes Bolyai, Cluj Napoca, Romania*
- Aldiani, Sulani. 2010. Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara*.
- Ardiansyah. 2011. Factors Affecting The Affecting The Readiness Of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standards (Case Study on Working Units in KPPN Malang's Working Area)

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Christensen, Mark. 2002. Accrual Accounting In The Public Sector: The Case Of The New South Wales Government. *Journal Southern Cross University*
- Davis, Nicholas. 2010. Accrual Accounting and the Australian Public Sector – A Legitimation Explanation. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 4(2), pp: 61-78.
- Grandis F.G. & Mattei G. 2012. Is There a Specific Accrual Basis Standard For The Public Sector ? Theoretical Analysis and Harmonization of Italian Government Accounting. *Journal of Accounting, No. 1, pp. 27-37*
- Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 (Studi Empiris :Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*
- Khairina Nur, Izzaty. 2011. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (Studi Pada Blu Universitas Diponegoro Semarang). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*
- Kristyono, Joko. 2013. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Keuangan Daerah Sesuai PP 71 / 2010 (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2012/2013). *Jurnal Akuntansi Fakulats Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*
- Luthan, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Pertama. Terjemahan Vivin Andika Yuwono dkk. Yogyakarta:Andi
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Rahmayati, Fitri. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II). *Skripsi*. Malang : Universitas Brawijaya.

- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. 2009. *Perilaku Organisasi* Buku 1. Jakarta :Salemba Empat
- Rowles, T. 2004. Accrual Accounting In The Public Sector: Its usefulness in economic decision making. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 3(2)
- Saleh, Z&Pendlebury M.W. 2002. Accruals Accounting in Government-Developments in Malaysia. *Asia Pacific Business Review Journal*, 12 (4): 421-435.
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Disampaikan pada Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Stefanescu, Aurelia. 2011. Accrual Accounting, Foundation For The Financial Reporting Into The Public Sector Entities. *Journal Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 13(2), 2011
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Tickell, Geoffrey. 2010. Cash To Accrual Accounting: One Nation's Dilemma. *International Business & Economics research Journal*, 9 (11): 71-78.
- Tikk, Jutta. 2010. Accounting Changes In The Public Sector In Estonia. *Business: Theory and Practice research Journal*, 11 (1): 77-85.
- Yogantara, Komang Krishna. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Pada Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada BPR di Bali). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara